

PERPUSSTAAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
NO. DAF. KE = 0163 / PER-UMP/08
ANGGAL = 05-04-08

**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR KARCIS PUNGUTAN
UMUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

Nama : Wita Suryani

NIM : 22 2003 017

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2008**



**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR KARCIS PUNGUTAN
UMUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)**

SKRIPSI



OLEH :

Nama : Wita Suryani

NIM : 22 2003 017

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2008**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WITA SURYANI**

NIM : 22 2003 017

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa Pembatalan Skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Februari 2008

Penulis



WITA SURYANI

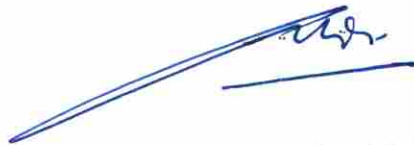
Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR
KARCIS PUNGUTAN UMUM DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

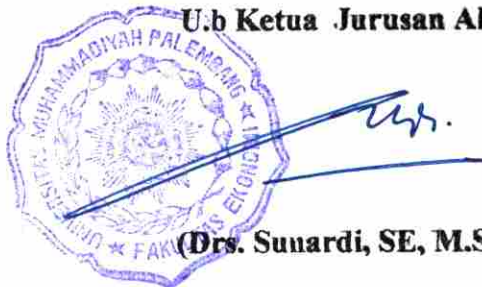
Nama : WITA SURYANI
NIM : 22 2003 017
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintahan

Diterima dan disyahkan
Pada tanggal,
Pembimbing,



(Drs. Sunardi, SE, M.Si)

Mengetahui
Dekan
U.b Ketua Jurusan Akuntansi



(Drs. Sunardi, SE, M.Si)

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

*Motto : “ Perkataan “ Sulit “ bukanlah kesimpulan akhir dari suatu permasalahan, tetapi lembaran awal dari suatu keberhasilan. “ Fa innama'al usri yusra “ karena sesungguhnya dibalik kesusahan itu terdapat kemudahan :
• (Qs. Al-Insyirah).*

Ku Persembahkan :

- *Ayah dan Bunda tercinta*
- *Saudara-saudaraku
tersayang*
- *Teman-teman
seperjuangan*
- *Almamaterku*



PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, serta Salawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Karcis Pungtar Umum Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Sunardi, Se. MSi yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak H. M. Idris, SE, MSi selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak H. Rosyadi, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Drs. Sunardi, SE. MSi dan Bapak M. Irfan, SE, Ak, MBA selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak M. Orba Kurniawan, SE, SH, BKP selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Perguruan Tinggi.
5. Segenap Tim Pengajar dan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. pimpinan beserta Staf dan karyawan/karyawati Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Ayah dan Ibu serta saudara-saudara ku yang telah mendidik, membiayai, mendo'akan dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.
8. The best my friends seperjuangan di Fakultas Ekonomi.
9. Teman-teman baikku yang banyak membantu.
10. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-nya. Amin .

Palembang, Februari 2008

Wita Suryani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	
HALAMAN PENGESAHAN DAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PRAKATA.....	iv
HALAMAN DAFTAR ISI	vi
HALAMAN DAFTAR TABEL	ix
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	10
B. Landasan Teori.....	11
1. Strategi menetapkan target pajak dan retribusi daerah	11
2. Reteibusi Daerah.....	12
3. Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum.....	17
a. Pengertian Pasar Karcis Pungutan Umum	17
b. Objek dan Subjek Retribusi	19
c. Tarif Retribusi Pasar	19
4. Pendapatan Asli Daerah.....	20
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	20

b. Unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah	21
5. Penetapan Target Penerimaan Retribusi Pasar	
Karcis pungutan umum	22
6. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	25
B. Tempat Penelitian.....	26
C. Operasional Variabel.....	26
D. Data Yang Diperlukan.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	30
1. Sejarah Singkat Pendapatan Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir	30
2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah.....	31
3. Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah	32
4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	47
5. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah.....	48
6. Retribusi Pasar Kabupaten Ogan Komering Ilir	48
7. Mekanisme Penerimaan dan Penyctoran Retribusi Pasar	51
8. Tarif Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	53
B. Pembahasan	56
1. Penetapan Target Penerimaan Retribusi Pasar Karcis Pungutan Urnum	56

b. Perhitungan potensi pasar karcis pungutan umum....	59
c. Proyeksi data realisasi pasar karcis pungutan umum	60
d. Penetapan target	60
1. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas	
Pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	61
a. Upaya Internal	61
b. Upaya Eksternal	63

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2002-2006	6
Tabel III.I Operasional Variabel.....	26
Tabel IV.1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	50
Tabel IV.3 Penetapan Tarif Los, Kios	54
Tabel IV.4 Penetapan Tarif Los, Kios	54
Tabel IV.5 Penetapan Tarif Los, Kios	55

DAFTAR GAMBAR

Haïaman

Gambar IV.2 Mekanisme Penerimaan Atau Penyetoran

Retribusi Pasar 52

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian	67
Lampiran 2 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	68
Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi.....	69
Lampiran 4 Biodata Penulis.....	70

ABSTRAK

WITA SURYANI /222003017/2008/Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan target Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum dan upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan target penerimaan Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh dinas pasar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang beralamat di Jl. Letnan Darna Jambi No. 161 telepon (0712) 321278 fax. (0712)323893 Kayuagung. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, tehnik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara. Metode analisis digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini bermanfaat bagi Dinas Pasar Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebagai masukan mengenai penetapan target penerimaan Retribusi Pasar Karcis Pungutan umum dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan bermanfaat bagi pihak lain sebagai sumber informasi mengenai penetapan target retribusi penerimaan retribusi pasar

Hasil analisis menunjukkan bahwa penetapan target penerimaan retribusi pasar karcis pungutan umum yang dilakukan Dinas Pasar Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sudah cukup baik hal ini dapat dilihat pada aktivitas-aktivitas pengendalian manajemen yang telah dijalankan oleh Dinas Pasar Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar adalah dengan memperbaiki sarana fasilitas yang ada dan memperbaiki kualitas pelayanan dan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan retribusi pasar.

Kata kunci : Penetapan Target retribusi pasar



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dimulainya otonomi daerah yang berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 2001 pemerintah di harapkan dapat melaksanakan pemerintahan yang baik. sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diganti dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Sebagai kosekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berke sinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya keuangannya secara optimal.

Misi utama dari kedua Undang-undang No. 32 dan 33 adalah desentralisasi fiskal, yang menghasilkan dua manfaat nyata. Pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong hasil pembangunan diseluruh daerah. Kedua memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambil keputusan publik ketingkat pemerintah dengan lebih rendah.

Secara khusus lagi, inti dari pelaksanaan Otonomi Daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Kedua Undang-undang tersebut menjadi dasar bagi daerah dalam melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya dan bertanggung jawab. Tentu saja dalam pelaksanaannya otonomi daerah tidak dilaksanakan sebenar-benarnya. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pasal 10 ayat 3 menegaskan bahwa urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan moneter, fiskal nasional dan agama.

Setiap organisasi baik organisasi sektor publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi yang diuraikan dalam bentuk aktivitas atau program-program, untuk itu memerlukan system pengendalian manajemen yang baik untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien. Kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terjadi karena kelemahan atau kegagalan pada salah satu atau beberapa tahap dalam proses pengendalian manajemen.

Sistem pengendalian manajemen sector publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Sehingga pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain

berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya manusia dan lingkungan yang mendukung. System pengendalian manajemen memiliki beberapa aktivitas yang terdiri dari : Perencanaan, Koordinasi, Komunikasi, Pengambilan Keputusan, Motivasi, Pengendalian, dan Penilaian Kerja.

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Menyadari pentingnya kelangsungan gerak pembangunan suatu daerah yang sejalan dengan pelaksanaan era otonomi, maka pemerintah perlu memperhatikan system perencanaan dan pengendalian manajemen yang baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah retribusi pasar.

Proses pengendalian dalam upaya meningkatkan retribusi pasar pada dasarnya merupakan proses penetapan peran dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Dalam proses pengendalian retribusi daerah ditetapkan pula sumber ekonomi yang disediakan untuk memungkinkan ia melaksanakan perannya. Oleh karena itu, pengendalian terhadap penerimaan retribusi sesuai dengan bagian manajemen yang mempunyai fungsi serta tugas yang telah ditetapkan. Salah satu dari kegiatan proses pengendalian manajemen yaitu pada penilaian kinerja manajer perusahaan yang masih sangat lemah dimana prestasi kerja pada intinya bias dilihat dari efisien dan efektif tidaknya seluruh bagian dalam strategi perusahaan.

Retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut berperan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang nyata,

dinamis, dan bertanggung jawab. Sejalan dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan pungutan hasil retribusi diperkirakan kepada masyarakat dan dunia usaha dengan cara memenuhi pelayanan tersebut. Retribusi daerah harus dipungut, dikelola secara professional dan bertanggung jawab karena wewenang pemungutan, pengelolaan dan penggunaan dana retribusi sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Dinas Pasar Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang pengelolaan pasar Karcis Pungutan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Pendapatan yang diterima oleh Dinas Pasar diperoleh dari tiga jenis, yaitu retribusi pasar, retribusi keindahan dan kebersihan, serta retribusi tinja. Terdapat lima jenis retribusi pasar yang dikelola oleh dinas pasar. Retribusi pasar adalah bagian dari retribusi jasa usaha kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa halaman atau pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum, dimana Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum merupakan retribusi yang dikenakan terhadap pengguna fasilitas berupa swalayan, kios, los dan tanah lapang yang disediakan, penerimaan dan pemasukan diterima dalam satu tahun oleh Pemerintah Daerah. Para pengguna fasilitas tersebut dikenakan retribusi atas pemanfaatan fasilitas yang digunakan setiap hari, bulan ataupun tahun. Dalam pelaksanaan sistem penerimaan retribusi ini melibatkan berbagai

pihak, baik dari Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sebagai pemungutan retribusi maupun para pengguna fasilitas retribusi.

Retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ikut berperan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Sejalan dengan usaha pemerintah dalam dunia usaha dalam memenuhi pelayanan tersebut. Retribusi daerah harus dipungut, dikelola secara professional dan bertanggung jawab karena wewenang pemungutan, pengelolaan dan penggunaan dana retribusi sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Jenis-jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

1. Retribusi jasa umum
2. Retribusi jasa usaha
3. Retribusi perizinan tertentu

Otonomi diberikan kepada suatu daerah dengan tujuan agar daerah otonom dapat mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan daerah dalam rangka pelayanan masyarakat dan pembangunan suatu daerah sebagai konskuensi pemberian otonomi daerah pemerintah daerah harus berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Masalah utama yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dalam

bentuk dana perimbangan masih dominan. Dengan demikian pemerintah daerah harus dapat meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam menggali sumber daya yang potensial dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang termasuk kedalam golongan pajak daerah. (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum

Menurut PERDA Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) No.29 tahun 2002, tentang retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum adalah pembayaran atas persediaan fasilitas yang berupa swalayan, kios, los dan tanah lapangan. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum dari tahun 2002 sampai dengan 2006 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Tabel 1.1
Perkembangan Penerimaan dan Realisasi
Pasar Karcis Pungutan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)
Tahun 2002 sampai dengan 2006

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2002	Rp 250.000.000,-	Rp 246.755.040,-	98,70 %
2003	Rp 100.000.000,-	Rp 82.423.800,-	82,42%
2004	Rp 15.000.000,-	Rp 10.010.000,-	66,73%
2005	Rp 90.000.000,-	Rp 61.677.000,-	68,53 %
2006	Rp 70.000.000,-	Rp 40.463.200,-	57,80 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2002 realisasi penerimaan retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum adalah sebesar Rp.246.755.040,- lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar Rp.250.000.000,- atau 98,70 % Tahun 2003 realisasi sebesar Rp.82.423.800,-

lebih rendah dari target sebesar Rp.100.000.000,- atau 82,42%. Tahun 2004 realisasi penerimaan Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum sebesar Rp.10.010.000,- lebih rendah dari target yaitu sebesar Rp.15.000.000,- atau 66,73%. Tahun 2005 realisasi penerimaan sebesar Rp.61.677.000,- lebih rendah dari target yaitu sebesar Rp.90.000.000,- atau 68,53 %. Tahun 2006 realisasi penerimaan Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum juga tidak mencapai target yaitu sebesar Rp.40.463.200 sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp.70.000.000,- atau 57,80%.hal ini mengindikasikan realisasi penerimaan Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum dianggap belum maksimal. Dalam hal ini penurunan pendapatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir disebabkan oleh terjadinya pemekaran dalam Kabupaten OKI menjadi dua yaitu Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir (OI)..

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul : **“Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan target penerimaan Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum ?

2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Dinas Pasar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penetapan target penerimaan Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum pada Dinas Pendapatan Daerah.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pasar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan terutama mengenai hal-hal yang terkait dengan retribusi pasar karcis pungutan umum.

2. Bagi Dinas Pasar Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai masukan/bahan evaluasi dan pertimbangan guna membuat kebijakan dalam pengambilan keputusan terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Almamater

Dari segi akademis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk bidang studi yang sejenis bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul **“Pengaruh Realisasi Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sesudah Diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”** yang telah dilakukan oleh Kiki Eva Maria (2000). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah apakah realisasi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, apakah realisasi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi tertentu berpengaruh secara individual (parsial) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang untuk mengetahui realisasi retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu berpengaruh secara individual (parsial) terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Hasil penelitian adalah dapat dilihat pengaruh realisasi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 secara simultan lebih besar yaitu sebesar 42,6%



sesudah diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 sebesar 35,6%. Hal ini disebabkan karena banyaknya retribusi daerah diubah menjadi pajak retribusi parkir berubah menjadi pajak parkir dan retribusi bahan galian golongan c berubah menjadi pajak galian golongan C padahal retribusi-retribusi tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap retribusi daerah.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya (Kiki Eva Maria) membahas tentang pengaruh realisasi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan penelitian ini hanya mengetahui penetapan target penerimaan Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Landasan Teori

1. Strategi menetapkan target pajak dan retribusi daerah.

Menurut Buku Pedoman Latihan dan Bimbingan Reformasi Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah halaman 64 langkah-langkah yang harus dilakukan adalah menghitung potensi sesuai kondisi yang ada dilapangan, serta membuat proyeksi data realisasi. Cara membuat proyeksi data realisasi sama dengan membuat proyeksi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), perbedaannya adalah adanya variabel lain yaitu tingkat inflasi dan tingkat kenaikan tarif. Menggunakan tingkat inflasi jika tarif-tarif yang ada ditetapkan dalam bentuk persentase, dan jika ditetapkan dalam rupiah, maka menggunakan tingkat kenaikan tarif. Selisih antara rata-rata

tingkat kenaikan dari realisasi selama kurun waktu tertentu (5 tahun) dengan rata-rata tingkat inflasi atau rata tingkat kenaikan tarif akan didapatkan tingkat kenaikan riel. Tingkat kenaikan riel ini menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah c.q. Dinas Pendapatan Daerah dalam merealisasikan target yang sudah ditetapkan tanpa melakukan program tindakan apapun.

Tingkat kenaikan riel ditambah dengan besarnya tingkat inflasi/tingkat kenaikan tarif dan konstanta sebesar 100% kemudian dikalikan data satu (1) tahun sebelumnya, maka akan kita dapatkan hasil proyeksi data realisasi, begitu seterusnya untuk tahun-tahun selanjutnya.

Hasil perhitungan potensi diproyeksikan selama kurun waktu tertentu (5 tahun) kemudian kita bandingkan dengan hasil proyeksi data realisasi pada tahun bersangkutan. Hasil perbandingan ini kita dapatkan potensi terpendam. Potensi terpendam ini setelah gali dengan program tindakan yang ditetapkan, maka hasilnya kita tambah dengan proyeksi data realisasi akan ditetapkan target (rencana penerimaan tahun depan).

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah yang di berikan kepada masyarakat sebagai pembayaran disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha milik daerah, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik jasa langsung maupun jasa yang diberikan secara tidak langsung.

Menurut Undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Mardiasmo (2002:100), retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Jadi, retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah yang diberikan kepada masyarakat sebagai pembayaran disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha milik daerah, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik jasa langsung maupun jasa yang diberikan secara tidak langsung.

Menurut Banyamin Haris (1999:89) mengatakan 3 faktor utama sebagai penyebab ketidakefisienan pemungutan pajak atau retribusi di Indonesia. Ketiga factor tersebut adalah :

- a. Tarif yang terlalu tinggi
- b. Lemahnya aparat pajak atau retribusi
- c. Rendahnya tingkat kepatuhan membayar

Menurut Banyamin Haris (1999:84) pemungutan retribusi mempunyai sifat-sifat tertentu :

- a. Dapat dipaksakan tetapi dengan pertimbangan ekonomis.

- b. Ada imbalan langsung kepada pembayar.
- c. Meskipun telah memenuhi persyaratan formal dan material tetapi masih diberikan alternative untuk mempertimbangkan kemampuan membayar.
- d. Retribusi merupakan pungutan tanpa menonjolkan anggaran.
- e. Dalam hal-hal tertentu retribusi digunakan untuk suatu tujuan, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pada pengambilan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Beberapa ciri-ciri pokok dari retribusi daerah dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- b. Pengenaan pemungutan bersifat kontraprestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah.
- c. Dikenakan pemungutan retribusi kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi merupakan salah satu unsur pendapatan asli daerah, disamping hasil pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Retribusi berfungsi sebagai :

- a. Retribusi jasa umum merupakan balas jasa oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pememfaaan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- b. Retribusi jasa usaha yang merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersil kerana pelayanan tersebut belum cukup disediakan swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu yang merupakan pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. Pemungutan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dalam retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan untuk menggunakan pelayanan jasa yang bersangkutan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
- d. Retribusi parkir di tepi jalan umum
- e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- f. Retribusi penggantian biaya cetak peta

- g. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- h. Retribusi pelayanan pasar
- i. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- j. Retribusi penujian kapal perikanan

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

Subjek retribusi jasa usaha adalah bada yang menggunakan jasa usaha yang bersangkutan. Jenis-jenis retribusi jasa usaha :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan pertokoan
- c. Retribusi terminal
- d. Retribusi penyedot kakus
- e. Retribusi rumah potong hewan
- f. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- g. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- h. Retribusi sektor angkutan sungai, danau dan penyeberangan
- i. Retribusi pengolahan limbah cair
- j. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam langkah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang peibadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek

3. Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum

- a. Pengertian Pasar Karcis Pungutan Umum

Menurut Mardiasmo (2002 : 100) menyatakan bahwa pengertian pasar karcis pungutan umum merupakan salah satu unsur dalam meningkatkan jumlah pendapatan daerah guna mendukung pembangunan yang akan terjadi di masa yang akan datang dan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah di era otonomi sekarang ini, pungutan retribusi pasar karcis pungutan umum adalah salah satu bentuk fasilitas masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum, menurut peraturan daerah kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) No. 6 tahun 1999, pasar adalah tempat yang yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman atau pelataran, bangunan berbentuk los, kios dan bentuk lainnya yang



dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang termasuk pasar swadaya.

Menurut peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang berkaitan dengan retribusi pasar karcis pungutan umum adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pasar adalah pembayaran atas persediaan fasilitas pasar sederhana/tradisional yang berupa halaman/pelataran, kios dan atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
- 2) Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 3) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
- 4) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
- 5) Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
- 6) Kios adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

b. Objek dan Subjek Retribusi Pasar

Menurut Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1999 Pasal 3 objek retribusi pasar adalah :

- 1) Objek Retribusi Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa halaman/pelataran kios, los yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- 2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah. Menurut Peraturan Daerah No. 6 pasal 4 Subjek Retribusi Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

c. Tarif Retribusi Pasar

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya yang retribusi yang terhutang.

Tarif retribusi pasar adalah nilai rupiah yang dibebankan kepada para pemakai fasilitas yang dapat dibebankan berdasarkan golongan seperti los dan kios.

Perencanaan tarif retribusi pasar ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tersebut dilapangan sehingga harus diperhitungkan dengan hati-hati dengan kata lain tarif retribusi pasar untuk setiap unit jasa pelayanan yang telah ditetapkan dapat menjadi faktor kunci

keberhasilan maupun kegagalan pemungutan retribusi pasar. Dalam hal ini tentunya sangat berpengaruh kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui penetapan target penerimaan retribusi pasar.

4. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian pendapatar asli daerah

Menurut UU RI No. 32 tahun 2002 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa pendapatan hasil daerah (PAD) adalah pendapatan dari suatu daerah yang keseluruhan pendapatannya diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan hasil penyeteroran kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain daerah yang sah setiap tahunnya.

Menurut Ahmad Yani (2002:39) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dan wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu unsure penting bagi pemerintah daerah dalam memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang, hak ini akan mendorong pemerintah daerah dapat lebih berupaya meningkatkan pempdapatan asli daerah.

b. Unsur-unsur pendapatan asli daerah

Menurut UU RI No 32 tahun 2004 menyatakan bahwa unsur-unsur pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

1). Hasil pajak daerah

Yaitu pengutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek seperti orang atau badan, benda bergerak atau tidak bergerak, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2). Hasil retribusi daerah

Yaitu pengutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata.

3). Bagian laba BUMD

Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari bank perkreditan rakyat (BPR), bank kredit kecamatan (BKK), dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Misalnya laba deviden, penjualan saham milik daerah.

4). Pendapatan lain-lain yang sah

Yaitu merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Misalnya hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro.

5. Penetapan target penerimaan Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum pada dinas pendapatan daerah.

Menurut Abdul Halim (2000:174) penetapan target mempunyai beberapa sasaran pokok yaitu :

- a) Memperjelas rencana strategi
- b) Membantu koordinasi kegiatan beberapa bagian
- c) Melimpahkan tanggung jawab kepada pimpinan, untuk memberi otorisasi jumlah yang diizinkan untuk dikeluarkan dalam menginformasikan kinerja yang dinarapkan
- d) Memperoleh kesempatan bahwa penetapan target merupakan dasar penilaian kinerja.

Menurut Arifin Sabeni dkk (2001 :42) tahap-tahap dalam membuat penetapan target penerimaan sebagai berikut :

- a) Menentukan tujuan yang hendak dicapai;
- b) Mengkaji pengalaman-pengalaman;
- c) Melihat prospek perkembangan yang akan datang;
- d) Menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan

Menurut Indra Bastian (2001:62) prosedur penetapan target harus berpedoman pada :

- a) Data realisasi tahun yang lalu;
- b) Perkiraan imbangan kenaikan/penurunan dalam tahun yang lalu dan hal-hal yang mempengaruhi;

c) Penerimaan pendapatan daerah, antara lain perkembangan jumlah objek pungutan.

6. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah

Menurut Kunarjo (1999: 178) bahwa untuk mengatasi rendahnya penerimaan retribusi daerah pada umumnya pemerintah dapat melakukan pendekatan identifikasi maka yang harus dilakukan adalah:

- a) Kemampuan sumber daya harus ditingkatkan
- b) Koordinasi antar karyawan dan instansi terkait dikembangkan
- c) Kualitas pelayanan harus diperbaiki

Sedangkan usaha ekstensifikasi :

- a) Pendekatan objek dan subjek pajak atau retribusi
- b) Penggalian sumber-sumber baru
- c) Pembuatan peraturan-peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan

Menurut Nasir dan Halim (2006: 49) dalam kajian tentang keuangan daerah pemerintah kota Malang bahwa upaya pemecahan-pemecahan belum optimalnya pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- a) Mengupayakan agar dalam penentuan target dilakukan secara realistis
- b) Pengerimis tingkat kebocoran dan kelolosan

Ini dapat dilihat dari :

- (1). Mengeektifkan pemberlakuan sanksi

- (2).Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan operasional di lapangan
- (3).Mengupayakan tersedianya pelayanan yang prima terhadap masyarakat dalam pemungutan pajak dan retribusi
- c) Mengupayakan agar jenis objek penerimaan yang berasal dari pajak maupun retribusi yang jumlahnya berkurang dapat di tingkatkan kembali

Menurut Machfut Sidik (2002: 9) tentang optimalisasi pungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, bahwa upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Memperluas basis penerimaan
- b) Memperkuat proses pemungutan
- c) Meningkatkan pengawasan
- d) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
- e) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Selanjutnya, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan pemerintah untuk menemukan kewenangan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2002:29), jenis penelitian berdasarkan jenis data yang diteliti dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis yaitu:

1. Penelitian Opini

Penelitian opini adalah penelitian terhadap fakta berupa opini atau pendapat orang (responden).

2. Penelitian Empiris

Penelitian empiris adalah penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengamatan.

3. Penelitian Arsip

Penelitian arsip adalah penelitian terhadap fakta yang tertulis (dokumen) atau berupa arsip data.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian arsip, karena dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap fakta yang berupa dokumen atau arsip tentang retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Tahun 2002 sampai dengan 2006.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang beralamat di Jl. Letnan Darna Jambi No.161 telepon (0712) 321278 fax. (0712)323893 Kayuagung.

C. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau bagaimana variabel tersebut diukur.

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Penetapan Target	Setelah dihitung besarnya potensi, kalau memungkinkan kita proyeksikan, kemudian kita membuat proyeksi data realisasi. Dua hasil perhitungan ini kita bandingkan, selisih hasil perbandingan ini setelah kita lakukan usaha penggalian. hasilnya ditambahkan dengan data proyeksi pada tahun bersangkutan akan kita dapatkan rencana penerimaan (target).	<ul style="list-style-type: none"> - Menghitung Potensi - Menghitung Proyeksi - Menghitung Potensi Terpendam - Menghitung Rencana Tindakan 50%
Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum	Usaha-usaha yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya Internal <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar karyawan dan instansi terkait dikembangkan b. Kualitas pelayanan harus diperbaiki 2. Upaya Eksternal <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan objek dan subjek pajak retribusi b. Pembuatan peraturan-peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan.

D. Data yang Diperlukan

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2002;146), sumber data penelitian terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain atau pihak lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, diperoleh dari Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang terdiri dari :

1. Data sejarah singkat Dinas Pasar ,struktur organisasi, pembagian tugas visi misi, tugas pokok dan fungsi.
2. PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2002 sampai dengan 2006.
3. Target Realisasi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2002 sampai dengan 2006.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data menurut Nan Lin W. G ilo (2002:116)

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Survei

Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan atau respon tentang sampel.

3. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden komunikasi tersebut berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka.

4. Kuisioner dan angket

Kuisioner disusun dalam bentuk kalimat Tanya sedangkan angket disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada masa lalu.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pimpinan atau karyawan yang berwenang untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dan dokumentasi, yaitu penulis menggunakan data yang telah tersedia di Dinas Pasar Karcis Pungutan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Mudrajad Kuncoro (2003:124), analisis data dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah metode analisis data yang tidak dapat diukur dalam angka.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang dapat diukur dengan angka.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan menggambarkan keadaan objek yang diteliti kemudian membandingkan teori-teori dengan kenyataan yang terjadi pada Dinas Pasar Karcis Pungutan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Teknik Analisis

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan angka, tabel, dan uraian penjelasan mengenai pasar karcis pungutan umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Secara geografis Ogan Komering Ilir terletak antara $104,20^{\circ}$ dan 106° bujur timur dan $2,30^{\circ}$ sampai $4,150^{\circ}$ lintang selatan dengan ketinggian rata-rata 10 meter diatas permukaan laut.

Secara administratif berbatas dengan Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin di sebelah utara, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Propinsi Lampung di sebelah selatan, Kabupaten Muara Enim disebelah barat Selat Bangka dan Laut Jawa di sebelah timur

Pada posisi sbelurn pemekaran, luas Kabupaten Ogan Komering Ilir 21 689,57 km dengan kepadatan penduduk 46 jiwa km^2 terdiri dari 18 Kecamatan, Wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Tulung Selapan (4.853 km^2) dan yang paling sempit adalah Kecamatan Rantau Alai ($112,41 \text{ km}^2$).

Setelah adanya pemekaran wilayah menjadi dua kabupaten yaitu Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir. Luas Ogan Komering Ilir adalah 19.025 km^2 terdiri dari 12 kecamatan dengan jumlah penduduk 645.95 jiwa.

Wilayah barat Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan hamparan daratan rendah yang luas, sebagian besar merupakan rawa-rawa. Daerah yang paling rendah adalah Kaecamatan Tanjung Lubuk dengan ketinggian 6 meter dari



permukaan laut sedangkan daerah yang paling tinggi adalah Kecamatan Pampangan.

Jenis Tanah Yang ada terdiri dari tanah alluvial dan podsolid. Tanah alluvial terdapat di Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebar sebagian besar wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai unsure pelaksana di bidang pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya pembangunan di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2001 tentang pembentukan Dinas, dibentuklah Pendapatan Daerah (DISPENDA) Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)

Dalam sebuah pemerintah, sumber daya manusia sangat diperlukan untuk menjalankan Pemerintah. Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai sumber daya organisasi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memiliki motivasi yang tinggi, akan melaksanakan tugasnya dengan semangat yang tinggi hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Untuk Melaksanakan tugasnya maka dibentuklah struktur organisasi agar setiap pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.

3. Penabagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)

a. Kepala Dinas

Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibidang Pendapatan Daerah dalam perencanaan maupun perumusan kebijaksanaan umum.
2. Memimpin, mengkoordinasi, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas.
3. Membuat program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
4. Memberikan informasi mengenai situasi Pendapatan Daerah, saran dan perkembangan kepala Bupati
5. Mempertanggung jawabkan tugas Dinas secara taktis operasional dan teknis administrative kepala Bupati
6. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

b. Bagian Tata Usaha.

Bagian tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dalam hal :

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum di lingkungan Dinas.
2. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran rutin.
3. Menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tata laksana administrasi umum.

4. Menyelenggarakan pengolahan dan bimbingan administrasi dalam tata usaha kepegawaian, keuangan dan umum.
5. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas serta pengembangannya.
6. Menyelenggarakan kegiatan rumah tangga Dinas.

c. Sub Bagian Umum.

Sub bagian umum dipimpin seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala bagian tata usaha dalam hal :

1. Melaksanakan bagian ketatausahaan.
2. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah-naskah Dinas.
3. Menyelenggarakan pengetiakan dan penggalan surat-surat/naskah Dinas.
4. Menyimpan, mengatur dan memelihara arsip Dinas.
5. Melaksanakan urusan rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolian.
6. Menginventarisikan dan memelihara kendaraan dinas.

d. Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dalam hal :

1. Melaksanakan administrasi bagian kepegawaian di lingkungan Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan memelihara data kepegawaian dilingkungan Dinas.
3. Menyusun daftar Kepangkatan (DUK) dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Daftar Nilai Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai lingkungan Dinas
4. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana formasi, usulan pengangkatan dan mutasi pegawai dilingkungan Dinas
5. Menusun rencana pengembangan pegawai dilingkungan Dinas
6. Melakukan usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dilingkungan Dinas.

e. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, mempunyai membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian tata usaha dalam hal

1. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan daftar Isian Kegiatan (DIK).
3. Menyiapkan dan mengurus Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
4. Melaksanakan pembukuan keuangan belajar rutin secara sistematis sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku.

5. Menyusun daftar gaji dan tunjangan serta melaksanakan pembayarannya.
6. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pembayaran uang untuk keperluan Dinas.

f. Sub Bagian Pendaftaran dan Pendataan

Subdin pendaftaran dan penataan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Memimpin, dan menyelenggarakan pembinaan administrasi pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi daerah, serta pungutan-pungutan lainnya.
2. Melaksanakan pemeliharaan dan pendataan terhadap objek dan subjek pajak dan wajib retribusi daerah yang ada dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui formulir pendaftaran.
3. Menghimpun, mengelola data objek dan subjek wajib pajak serta retribusi daerah melalui SPTPD.
4. Melaksanakan pemeriksaan lokasi/lapangan wajib pajak.
5. Menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
6. Membantu melakukan penyimpanan SPOP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari wajib pajak.

g. Seksi Pendaftaran.

Seksi Pendaftaran dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sub Bagian Dinas Pendaftaran dan Pendataan dalam hal :

1. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah.
2. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah yang belum diterima kembali.
3. Mencatat, membukukan identitas wajib pajak retribusi dan wajib pungut lainnya kedalam buku induk.
4. Menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Penataan sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Seksi Pendataan.

Seksi pendataan dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pendaftaran dan Penataan dalam hal :

1. Menghimpun, mengelola dan mencatat data objek pajak, subjek pajak dan retribusi daerah.
2. Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi terhadap wajib pajak guna menerapkan pajak sebaik-baiknya dan menertitkan kartu dan wajib pajak/retribusi daerah dan penerimaan lainnya.

3. Membuat daftar mengenai formulir SPTPD yang belum diterima kembali.
4. Melaksanakan tugas lain dengan diberikan Kepala Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan sesuai dengan bidang tugasnya.

i. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pendaftaran dan Penataan dalam hal :

1. Membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak daerah dan Wajib Retribusi Daerah.
2. Memberikan kartu pengenal NPWPD kepada wajib pajak/wajib retribusi.
3. Mengumpulkan, mengelola serta menyelenggarakan dokumentasi data.
4. Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan penataan.
5. Membantu melaksanakan penyampaian SPOP PBB kepada para wajib pajak serta menerima isian SPOP PBB dari wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pendaftaran dan Penataan sesuai dengan bidang tugasnya.

j. Subdin Penetapan

Subdin Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal :

1. Melakukan perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah.
2. Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran penyeteroran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah.
3. Menerbitkan dan mendistribusikan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta menyiapkan arsip surat perpajakan dan retribusi yang berkaitan dengan penetapan.
4. Membantu melakukan penyampaian SPPT PBB beserta DHKP PBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak, serta mendistribusikan kepada wajib pajak dan kepada unit lain yang terkait.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Dinas Sesuai dengan bidang tugasnya.

k. Seksi Perhitungan

Seksi Perhitungan dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Penetapan, dalam hal :

1. Melaksanakan penelitian, perhitungan, penetapan pajak retribusi daerah sesuai dengan kartu data yang diterima dari Subdin Pendaftaran dan Penetapan.
2. Melaksanakan penetapan secara jabatan pajak dan retribusi daerah.
3. Melaksanakan penetapan tambahan pajak dan retribusi daerah.

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Subdin Penetapan sesuai dengan tugasnya.

L. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

Seksi Penerbitan Surat Ketetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penetapan dalam hal:

1. Membuat dan menerbitkan SKP, SKR Perjanjian Angsuran dan Surat-surat ketetapan lainnya.
2. Meneliti daftar WP/WR yang sudah dan yang belum diterbitkan surat ketetapannya.
3. Menerbitkan dan menyimpan arsip surat Perpajakan dan retribusi Daerah.
4. Membantu Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan penyampaian SPPT PBB serta dokumen PBB lainnya.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Penetapan sesuai dengan bidang tugasnya.

m. Seksi Angsuran

Seksi Angsuran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Subdin Penetapan, dalam hal:

1. Menerima surat permohonan angsuran Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Melakukan perhitungan jumlah angsuran pajak dan pungutan pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak.
3. Menyiapkan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan angsuran pemungutan pembayaran penyetoran pajak dan retribusi daerah.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Penetapan sesuai dbidang tugasnya.

n. Subdin Pembukuan dan Pelaporan

Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, membantu tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

1. Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah didalam Kartu Wajib Pajak dan retribusi daerah serta kedalam kartu pengawas pembayaran PBB dan DHKP.
2. Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga kedalam kartu persediaan benda berharga.
3. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah, menghitung realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan, dan tahunan serta realisasi dan tunggakan PBB.

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

o. Seksi Penerimaan

Seksi Penerimaan dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan dalam hal :

1. Mengadakan dan mencatat semua SKPD, SKRD dan surat-surat mengenai penerimaan secara sistematis dan kronologis mengenai penerimaan pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya.
2. Menerima tindasan bukti setor pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya dari bendaharawan khusus penerimaan/penyetor dan mencatat kedalam kartu wajib pajak/retribusi.
3. Mencatat penerimaan/pembayaran/penyetoran PBB serta perhitungan tunggakan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub Dinas pembukuan dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

p. Seksi Pembukuan Persediaan

Seksi Pembukuan Persediaan dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan, dalam hal :



1. Mengadakan tata pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenai persediaan benda berharga.
2. Menerima dan mencatat tanda terima benda berharga, bukti penerimaan benda berharga, bukti pengeluaran/pengembalian benda berharga.
3. Menerima dan mencatat bukti-bukti penerimaan uang hasil pemungutan benda berharga.
4. Menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

q. Subdin Penagihan

Sub Dinas Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

1. Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pelayanan keberadaan dan permohonan banding sesuai dengan kewenangannya.
3. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.



r. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Dinas Penagihan dalam hal:

1. Menyiapkan dan mengirimkan surat yang berhubungan dengan penagihan.
2. Mendokumentasikan surat-surat yang berhubungan dengan penagihan.
3. Mengadakan operasi dan melaksanakan penagihan secara langsung kepada wajib pajak/wajib retribusi berlaku.
4. Menyiapkan dan melaksanakan, tegoran, surat paksa, sita lelang, sesuai dengan sisdur yang berlaku.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub Dinas Penagihan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Keberatan

Seksi Keberatan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Dinas Penagihan dalam hal :

1. Menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah
2. Menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan atas meteri penetapan pajak dan retribusi daerah.
3. Meneruskan penyelesaian permohonan banding ke majelis pertimbangan pajak atas penetapan pajak dan retribusi daerah.

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sub Dinas Penagihan sesuai dengan bidang tugasnya.

t. Seksi Pengelolaan dan Penerimaan Sumber Lain-lain

Seksi Pengelolaan dan Penerimaan sumber lain-lain dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Dinas dalam hal :

1. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan penagihan atas tunggakan-tunggakan pungutan pendapatan lain sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Dinas-dinas/Instansi yang bersangkutan.
3. Melakukan pembinaan terieb administrasi dibidang pungutan/penerimaan pendapatan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Dinas-dinas/Intansi yang melaksanakan pungutan pendapatan lain-lain.
4. Menyusun/membuat daftar realisasi penerimaan dari hasil penerimaan lain-lain atas dasar laporan bulanan/berlaku yang diterima dari Dinas-dinas/Instansi yang menyelenggarakan pungutan.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub Dinas Penagihan sesuai dengan bidang tugasnya.

u. Subdin Perencanaan dan pengendalian Operasional.

Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah, dalam hal :

1. Melakukan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi daerah, serta dari PBB
2. Melakukan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan PBB.
3. Melakukan pemantauan, penggalian dan peningkatan sumber pendapatan daerah.
4. Melakukan kerja sama dengan instansi vertikal dan dinas lainnya.
5. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

v. Seksi Perencanaan

Seksi Perencanaan dipimpin oleh seorang seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional dalam hal :

1. Menyusun rencana pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain serta PBB.

2. Menyusun rencana intensifikasi pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya serta PBB.
3. Melakukan Pembinaan pelaksanaan tata kerja dan tata hubungan kerjasama serta pembinaan penggunaan sarana dan prasarana pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

w. Seksi Pengendalian Operasional

Seksi Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional dalam hal :

1. Merumuskan rancangan peraturan daerah dan Keputusan kepala daerah tentang perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
2. Mengumpulkan dan mengelola data sumber pendapatan daerah.
3. Menggali, meningkatkan dan mengembangkan sumber pendapatan daerah.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala subdin Perencanaan dan Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugasnya

x. Seksi Penyuluhan

Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional dalam hal :

1. Menyusun bahan penyuluhan.

2. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, memberikan informasi penerangan perpajakan dan retribusi daerah, PBB dan pendapatan daerah lainnya.
3. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan dilingkungan Dinas.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Subdin Perencanaan dan Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

4.1 Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah melaksanakan tugas pokok pemerintah dibidang pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya meliputi perencanaan, pendataan, penyuluhan dan penyeteroran pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya.

4.2 Fungsi

Dinas Pendapatan Daerah fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.
2. Penyelenggaraan pendataan, pendaftaran, pemungutan dan penagihan wajib pajak dan retribusi daerah, penerimaan asli daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan.
3. Pelaksanaan penetapan besar pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap subjek dan objek pajak daerah.

5. Membantu melaksanakan pendaftaran subjek dan objek pajak bumi dan bangunan dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) wajib pajak, Surat Pemberitahuan Pajak (SPP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), dan sarana administrasi Pajak Bumi dan Bangunan lainnya.
6. Pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
7. Pelaksanaan pengawsan bimbingan teknis terhadap unit-unit dilingkungan Dinas Pendapatan daerah.
8. Pelaksanaan urusan keretausahaan dan perlengkapan.

5. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah

5.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah.

1. Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berdisiplin, berahlak, mandiri dan sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya pendapatan daerah yang handal untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab.

5.2 Misi Dinas Pendaatan Daerah

Memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

6. Retribusi Pasar Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna menunjang pembiayaan pembangunan. Peningkatan penerimaan retribusi

merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Keberhasilan suatu daerah menggali potensi pendapatan akan menentukan keberhasilan pelaksanaan proses otonomi. Sehingga daerah mampu melaksanakan segala kegiatan pembangunan, tanpa harus mengandalkan bantuan sepenuhnya dari pusat.

Retribusi disetiap daerah kabupaten jumlahnya tidak sama antara daerah satu dengan yang lainnya, hal ini tergantung pada kreativitas pemerintah daerah dalam menjangkau retribusi. Salah satu retribusi yang memberikan kontribusi yang cukup berarti adalah retribusi pasar.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) adalah retribusi pasar, dimana retribusi pasar merupakan retribusi yang dikenakan terhadap pengguna fasilitas pasar yang disediakan, penerimaan dan pemasukannya diterima dalam satu tahun oleh Pemerintah Daerah. Para pengguna fasilitas tersebut dikenakan retribusi atas pemanfaatan fasilitas yang digunakan setiap hari, bulan ataupun tahunan. Dalam pelaksanaan system penerimaan retribusi ini melibatkan berbagai pihak, baik dari Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai pemungutan retribusi maupun para pengguna fasilitas retribusi.

Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi Retribusi Pasar dari tahun 2002 sampai dengan 2006 :

Tabel IV.1
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Tahun 2002 sampai dengan 2006

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2002	Rp 250.000.000,-	Rp 246.755.040,-	98,70 %
2003	Rp 100.000.000,-	Rp 82.423.800,-	82,42%
2004	Rp 15.000.000,-	Rp 10.010.000,-	66,73%
2005	Rp 90.000.000,-	Rp 61.677.000,-	68,53 %
2006	Rp 70.000.000,-	Rp 40.463.200,-	57,80 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2002 realisasi penerimaan retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum adalah sebesar Rp.246.755.040,- lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar Rp.250.000.000,- atau 98,70 %. Tahun 2003 realisasi sebesar Rp.82.423.800,- lebih rendah dari target sebesar Rp.100.000.000,- atau 82,42%. Tahun 2004 realisasi penerimaan Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum sebesar Rp.10.010.000,- lebih rendah dari target yaitu sebesar Rp.15.000.000,- atau 66,73%. Tahun 2005 realisasi penerimaan sebesar Rp.61.677.000,- lebih rendah dari target yaitu sebesar Rp.90.000.000,- atau 68,53 %. Tahun 2006 realisasi penerimaan Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum juga tidak mencapai target yaitu sebesar Rp.40.463.200 sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp.70.000.000,- atau 57,80%.hal ini mengindikasikan realisasi penerimaan Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum dianggap belum maksimal. Dalam hal ini penurunan pendapatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir disebabkan oleh terjadinya pemekaran dalam Kabupaten OKI menjadi dua yaitu Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir (OI).

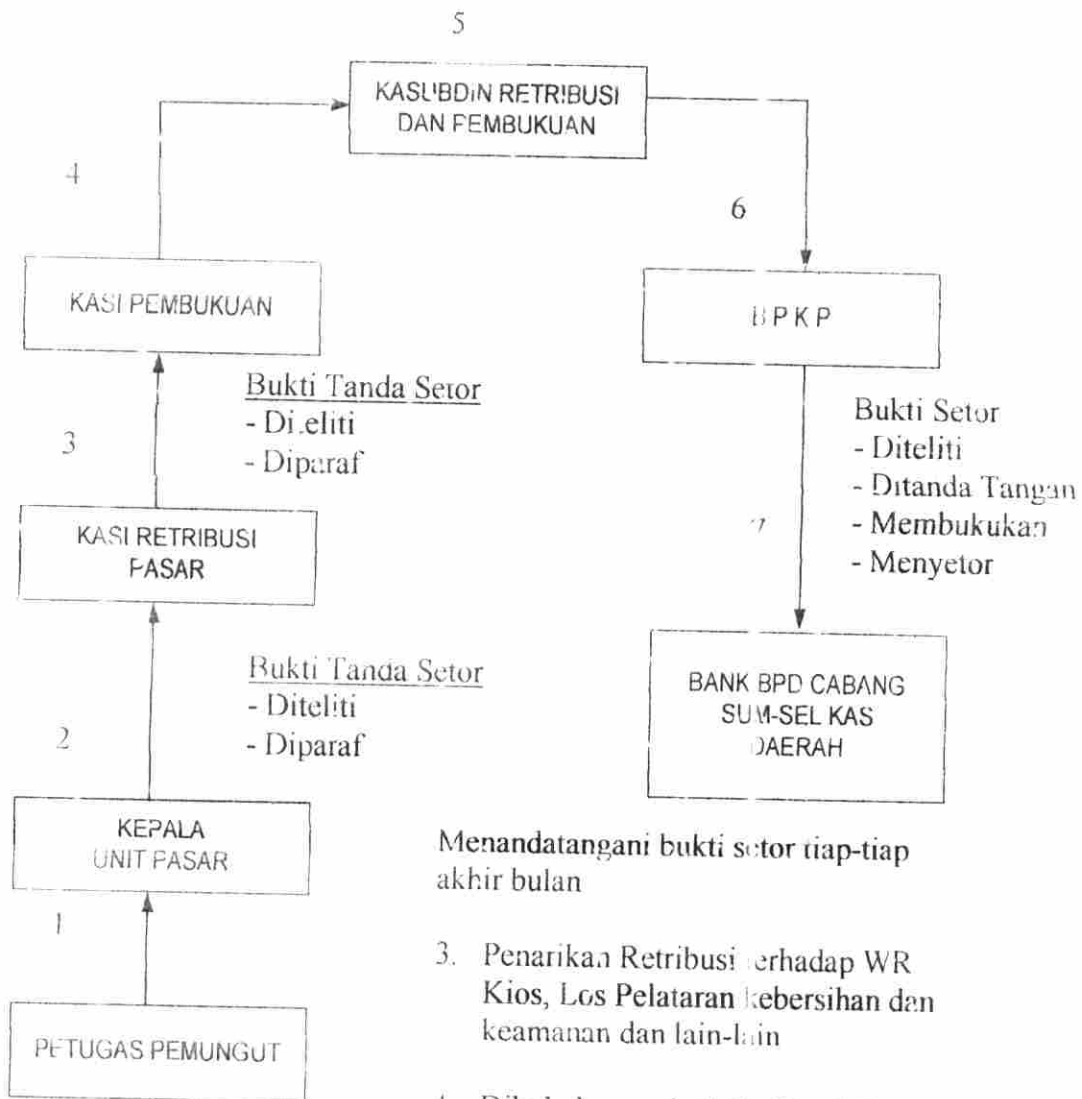
7. Mekanisme Penerimaan dan Penyetoran Retribusi Pasar

1) Mekanisme Kerja

- a) Dari juru pungut wajib pasar yang bersumber dari kios, los tanah lapang (pelataran) disetor kepetugas pemungut unit pasar untuk dibukukan kepada buku bend 10.
- b) Tiap-tiap unit pasar bukti tanda setor ditanda tangani oleh kepala unit pasar.
- c) Dari kepala unit pasar bukti tanda setor tiap-tiap akhir bulan diajukan dan diparaf oleh kasi retribusi, kasi pembukuan untuk penelitian kebenaran terhadap bukti tanda setor uang retribusi dimaksud selanjutnya diserahkan kepada kasubdin retribusi dan pembukuan, untuk ditanda tangani.
- d) Dari kasubdin retribusi dan pembukuan diteruskan kepada bendahara pembantu khusus penerima untuk dihimpun dan dibukukan pada buku kas umum.
- e) Kemudian bukti tanda setor lembar pertama diberikan kepala unit pasar lembar 2, 3, dan 4 untuk subdin retribusi dan pembukuan sebagai arsip yang bersangkutan.
- f) Dari bendahara pembantu khusus penerima Dinas Pasar kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bukti tanda setor retribusi yang ditanda tangani disetor pada rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Kayuagung.

- 2) Struktur Mekanisme penerimaan/penyetoran Re ribusi Pasar Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Gambar IV.II
Mekanisme Penerimaan/Penyetoran Retribusi Pasar



8. Tarif Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) No. 6 Tahun 1999 tentang retribusi pasar, dalam menentukan struktur dan besarnya tariff berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas pelataran, los, kios, luas lokasi, dan jangka pemakaian. Kelas pasar yang dimaksud adalah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan penetapan tarif berdasarkan lokasi maksudnya lokasi yang digunakan untuk menentukan kelas pasar.

Adapun Struktur dan besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Pasar Kelas I	: Keamanan	Rp.4000/bulan
	: Kebersihan	Rp.200/hari
Pasar Kelas II	: Keamanan	Rp.3000/bulan
	: Kebersihan	Rp.100/hari
Pasar Kelas III	: Keamanan	Rp.2000/bulan
	: Kebersihan	Rp.100/hari

Tabel IV.3
Penetapan tarif los/kios
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

Pasar Kelas I

Lokasi	Jenis Bangunan	Luas	Tarif
Pasar Kelas I	a. Los		
	- Semi permanen	2,5 m x 2,5 m 2 m x 3 m 3 m x 3 m	Rp 15.000/bin
	- Permanen	2,5 m x 2,5 m 2 m x 3 m 3 m x 3 m	Rp 20.000/bln
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2,5 m x 2,5 m 2 m x 3 m 3 m x 3 m	Rp 25.000/bln
	- Permanen	2,5 m x 2,5 m 2 m x 3 m 3 m x 3 m	Rp 30.000/bln
	c. Ruko		Rp 75.000/bln
	d. Pelataran	1 m x 1 m 2 m x 1 m	Rp 200/hari Rp 400/hari

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

Tabel IV.4
Penetapan tarif los/kios
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

Pasar Kelas II

Lokasi	Jenis Bangunan	Luas	Tarif
Pasar Kelas II	a. Los		
	- Semi permanen	2,5 m x 2,5 m 2 m x 3 m 3 m x 3 m	Rp 7.500/bln
	- Permanen	2,5 m x 2,5 m 2 m x 3 m 3 m x 3 m	Rp 15.000/bln
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2,5 m x 2,5 m 2 m x 3 m 3 m x 3 m	Rp 20.000/bln
	- Permanen	2,5 m x 2,5 m 2 m x 3 m 3 m x 3 m	Rp 25.000/bln
	c. Pelataran	1 m x 1 m 2 m x 1 m	Rp 200/hari Rp 400/hari

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)



Tabel IV.5
Penetapan tarif los/kios
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

Pasar Kelas III

Lokasi	Jenis Bangunan	Luas	Tarif
Pasar Kelas III	a. Los		
	- Semi permanen	2,5 m x 2,5 m 2 m x 3 m 3 m x 3 m	Rp 7.500/tin
	- Permanen	2,5 m x 2,5 m 2 m x 3 m 3 m x 3 m	Rp 10.000/bln
	d. Kios		
	- Semi Permanen	2,5 m x 2,5 m 2 m x 3 m 3 m x 3 m	Rp 15.000/bln
	- Permanen	2,5 m x 2,5 m 2 m x 3 m 3 m x 3 m	Rp 20.000/bln
	e. Pelataran		
		1 m x 1 m 2 m x 1 m	Rp 200/hari Rp 400/hari

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

B. Pembahasan

Dalam Bab ini akan membahas mengenai permasalahan yang diajukan pada bagian pendahuluan, yaitu bagaimana penetapan target penerimaan retribusi pasar karcis pungutan umum pada Dinas Pasar dan upaya yang dilakukan Dinas Pasar Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) agar Penerimaan Retribusi Pasar meningkat dan pada akhirnya PAD juga meningkat.

1. Penetapan Target Penerimaan Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum

Pasar Kelas I	1. Los		
	Semi Permanen	2,5m x 2,5 m	Rp 15.000/bulan
	Permanen	2,5m x 2,5 m	Rp 20.000/bulan
	2. Kios		
	Semi Permanen		Rp 25.000/bulan
	Permanen		Rp 30.000/bulan
	3. Ruko		Rp 75.000/bulan
	4. Pelataran (1mx1m)		Rp 200/hari x 30 = Rp.6.000/bulan
	(2mx1m)		Rp 400/hari x 30 = <u>Rp.12.000/bulan</u>
	Jumlah		= Rp.183.000/bulan

Pasar Kelas II	1. Los		
	Semi Permanen	2,5m x 2,5 m	Rp 7.500/bulan
	Permanen		Rp15.000/bulan
	2. Kios		
	Semi Permanen	2,5m x 2,5 m	Rp 20.000/bulan

Permanen	2,5m x 2,5 m	Rp 25.000/bulan
3. Pelataran (1mx1m)	Rp 200/hari x 30	= Rp.6.000/bulan
	(2mx1m) Rp 400/hari x 30	= <u>Rp.12.000/bulan</u>
Jumlah		= Rp.85.500/bulan

Pasar Kelas III1. Los

Semi Permanen	2,5m x 2,5 m	Rp 7.500/bulan
Permanen	2,5m x 2,5 m	Rp10.000/bulan
2. Kios		
Semi Perinaner	2,5m x 2,5 m	Rp 15.000/bulan
Permanen	2,5m x 2,5 m	Rp 20.000/bulan
3. Pelataran (1mx1m)	Rp 200/hari x 30	= Rp.6.000/bulan
	(2m x1m) Rp 400/hari x 30	= <u>Rp.12.000/bulan</u>
Jumlah		= Rp.70.500/bulan

Potensi retribusi pasar/tahun dengan asumsi tingkat hunian 100 %

Kelas I : 2,5m x 100% x Rp. 183.000 x 30 = Rp.13.725.000

Kelas II : 2,5m x 100% x Rp. 85.500 x 30 = Rp. 6.412.500

Kelas III : 2,5m x 100% x Rp. 70.500 x 30 = Rp. 5.287.500

Jumlah = Rp.25.425.000

Untuk menghitung potensi pedagang yang ada di pelataran (tidak terdaftar) kita perlu mengambil sample satu pasar setiap kelas kemudian secara sekilas kita amati jumlah pedagangnya setiap harinya missal :

Pasar Kelas I Misal pada kelas ini ada satu pasar, maka setelah kita amati sekilas terdapat 70 pedagang dengan retribusinya sebesar Rp.200/hari. Sehingga bias kita hitung potensi :

$$70 \times \text{Rp } 200 \times 365 = \text{Rp } 5.110.000$$

Pasar Kelas II Misal ada 2 unit, maka setelah kita amati 1 pasar sebagai sampel, ternyata ada 30 pedagang, sehingga jika 2 unit pasar jumlah pedagang sebanyak 60 pedagang. Jika retribusi Rp 200/hari, maka potens /tahun :

$$60 \times \text{Rp } 200 \times 365 = \text{Rp } 4.380.000$$

Pasar Kelas III Misal ada 3 unit, maka setelah kita amati 1 pasar sebagai sampel, ternyata ada 30 pedagang, sehingga jika 2 unit pasar jumlah pedagang sebanyak 90 pedagang. Jika retribusi Rp 200/hari, maka potens./tahun :

$$90 \times \text{Rp } 200 \times 365 = \text{Rp } 6.570.000$$

Jadi potensi retribusi pedagang pasar yang tidak terdaftar :

$$\text{Rp } 5.110.000 + \text{Rp } 4.380.000 + \text{Rp } 6.570.000 = \text{Rp } 16.060.000$$

Potensi retribusi pasar di Kabupaten Ogan Komering Lir :

Pasar Kelas I

1. Los

Permanen

Rp 20.000/bulan

2. Kios

Permanen

Rp 30.000/bulan

3. Pelataran (1mx1m) Rp 200/hari x 30 = Rp 6.000/bulan

(2mx1m) Rp 400/hari x 30 = Rp 12.000/bulan

Jumlah = Rp 18.000/bulan



Pasar Kelas II	1. Los		
	Permanen	2,5m x 2,5 m	Rp15.000/bulan
	2. Kios		
	Permanen	2,5m x 2,5 m	Rp 25.000/bulan
	3. Pelataran (1mx1m)	Rp 200/hari x 30 =	Rp.6.000/bulan
	(2mx1m)	Rp 400/hari x 30 =	<u>Rp.12.000/bulan</u>
	Jumlah		= Rp. 58.000/bulan

Pasar Kelas III	1. Los		
	Permanen	2,5m x 2,5 m	Rp10.000/bulan
	2. Kios		
	Permanen	2,5m x 2,5 m	Rp 20.000/bulan
	3. Pelataran (1mx1m)	Rp 200/hari x 30 =	Rp.6.000/bulan
	(2mx1m)	Rp 400/hari x 30 =	<u>Rp.12.000/bulan</u>
	Jumlah		= Rp. 48.000/bulan

Total potensi retribusi pasar pedagang tetap dan lesch an adalah :

$$\text{Rp.68.000} + \text{Rp. 58.000} + \text{Rp. 48.000} = \text{Rp 174.000/bulan}$$

a. Perhitungan potensi pasar karcis pungutan umum

Dari data jumlah pasar yang ada setelah kita hitung potensinya, baik mengacu dengan data sekunder maupun primer, missal kita dapatkan potensi pada tahun 2005 adalah sebesar Rp.90.000.000 jika potensi selama 5 tahun kedepan

dengan menambahkan variable rata-rata tingkat inflasi(1,34%) maka kita dapat data potensi selama 5 tahun kedepan sebagai berikut .

Uraian	Data proyeksi potensi
	Tahun 2005
Potensi	Rp 25.452.000 x 12 = Rp 305.100.000

b. Proyeksi data realisasi pasar karcis pungutan umum

Uraian	Data historis	Tingkat inflasi
Realisasi Tahun 2004	Rp 10.010.000	1,34
X tingkat inflasi		Rp 13.413.400

Setelah didapatkan tingkat kenaikan riel kemudian ditambah dengan tingkat inflasi masa yang akan datang dalam hal ini tingkat inflasi kita anggap konstan selama 5 tahun dan ditambah 100% hasilnya kita kalikan dengan data satu tahun sebelumnya, kita dapatkan angka proyeksi sebagai berikut :

c. Penetapan target

Dalam menetapkan rencana penerimaan (target) yaitu setelah dihitung besarnya potensi, kalau memungkinkan kita proyeksikan, kemudian kita membuat proyeksi data realisasi. Dua hasil perhitungan ini kita bandingkan, selisih hasil perbandingan ini setelah kita lakukan usaha penggalian, hasilnya



ditambahkan dengan data proyeksi pada tahun bersangkutan akan kita dapatkan rencana penerimaan (target).

Data data potensi dan proyeksi data realisasi pasar diatas, setelah kita lakukan perhitungan, maka kita dapatkan data-data sebagai berikut :

Uraian	Data proyeksi
Potensi	Rp 305.100.000
Proyeksi	Rp 13.413.400
Potensi terpendam	Rp 291.686.600
Rencana tindakan 50%	Rp 145.843.300
Target	Rp 159.526.700

Dari perhitungan diatas dilihat dari potensi yang dimiliki pada tahun 2005 seharusnya Dispenda Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menetapkan target sebesar Rp.159.526.700

2. Upaya yang dilakukan Dinas Pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

a. Upaya Internal

- 1) Koordinasi antar pemungut retribusi izin pasar dan pihak-pihak terkait meningkatkan penerimaan retribusi izin pasar, maka hendaknya Dinas Pasar dapat lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yaitu pihak kepolisian dan samsat, agar meningkatkan penerimaan

retribusi pasar, maka hendaknya Dinas Pasar Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melakukan :

- a) Meningkatkan waktu razia kepemilikan surat-surat izin menempati fasilitas pasar yang dimiliki oleh wajib retribusi.
- b) Pengawasan dan sekaligus melakukan koordinasi kelapangan secara langsung melalui razia dadakan
- c) Penindakan secara tegas terhadap wajib retribusi dan orang yang tidak memiliki surat izin menempati pasar.

Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisiskan pelanggaran yang akan terjadi, sehingga dengan demikian penerimaan retribusi izin menempati pasar dapat mencapai target yang ditetapkan.

2) Kualitas pelayanan harus diperbaiki

Dinas pasar selaku instansi pemerintah hendaknya memperhatikan juga kualitas pelayanan terhadap wajib retribusi, sehingga dengan demikian wajib retribusi akan mempunyai azas timbal balik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, hal ini dilakukan agar penerimaan retribusi izin pasar dapat mengalami penunggakan.

Kegiatan yang pernah dilakukan adalah : membekali aparatur agar petugas secara jujur, tepat dan cepat dalam melayani pemungutan retribusi izin pasar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan atau dengan kata lain tidak mempersulit para wajib retribusi untuk membuat surat keterangan izin pasar sehingga wajib retribusi izin pasar dapat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

b. Upaya eksternal

1. Pendekatan Subjektif

Pendekatan subjektif maksudnya dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama pada wajib retribusi pasar yaitu para pengguna fasilitas pasar dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Dinas Pasar Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) misalnya wajib pajak retribusi harus menempati jalur-jalur yang telah ditetapkan. Dan juga dengan cara memberikan penyuluhan kepada wajib retribusi pasar tentang pentingnya membuat surat izin menempati los atau kios dan juga pelataran agar dapat lebih mensosialisasikan kepada wajib retribusi izin menempati pasar baik secara langsung atau pun tidak secara langsung, hal ini dilakukan agar wajib retribusi pasar dapat memahami bahwa retribusi yang diwajibkan kepada mereka nantinya akan digunakan sebagai modal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Sehingga dengan semakin meningkatnya kesadaran wajib retribusi pasar tentang pentingnya retribusi yang dibayar maka secara tidak langsung penerimaan retribusi izin pasar dapat meningkat.

2. Pembuatan peraturan-peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan daerah.

Dinas pasar Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) hendaknya menyikapi perkembangan yang terjadi dimasyarakat, perkembangan yang terjadi tersebut kemudian diputuskan apakah layak menjadi retribusi atau tidak. Bila perkembangan tersebut tidak layak menjadi

bagian lain objek retribusi, maka dibuatlah suatu peraturan daerah yang bertujuan untuk memperkuat ketentuan hukum pemungutan ataupun kelancaran dalam pemungutan retribusi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini yang sudah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Penetapan target penerimaan retribusi pasar karcis pungutan umum.

Penetapan target retribusi pasar tahun 2005 seharusnya sebesar Rp. 90.000.000 Dinas Pendapatan Daerah menetapkan realisasi sebesar Rp. 61.572.000. Tidak tercapainya target ini bukan kesalahan dalam penetapan target, tetapi faktor lain. Karena potensi retribusi pasar di kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebesar Rp. 159.526.700.

2. Upaya-upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah

- a) Koordinasi antar pemungut retribusi izin pasar dan pihak-pihak terkait
- b) Kualitas pelayanan harus diperbaiki
- c) Pendekatan Subjektif
- d) Pembuatan peraturan-peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan daerah.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam penetapan target penerimaan retribusi pasar, sebaiknya DISPENDA harus meningkatkan kinerja yang akan dilaksanakan dalam penerimaan retribusi pasar. Diantara perbaikan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
2. Mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap fasilitas-fasilitas pasar seperti: perbaikan terhadap WC Umum, Lost, Kios, pelatiran yang ada di pasar

DAFTAR PUSTAKA

- Heidrachan dan Suad Husnan. 2000. **Manajemen**, YKPN, Yogyakarta.
- Kiki Eva Maria, 2002. **Pengaruh Realisasi Jasa Umum, Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**, Fakultas Ekonomi (Skripsi tidak dipublikasikan)
- Mudrajad Kuncoro. 2003. **Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi**, YKPN, Yogyakarta.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. **Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen**, Edisi Pertama. Penerbit. BPFE, Yogyakarta.
- Nan Lin Alif Banasa W. Gulo. 2002. **Metodologi Penelitian**, PT. Grasindo, Jakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999. **Tentang Retribusi Pasar Karcis Pungutan Umum**.
- Revrisond Baswir. 2000. **Akuntansi Pemerintahan Indonesia**, BPFE, Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. **Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. **Tentang Otonomi Daerah** , Penerbit Sinar Grafika.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Letnan Dharna Jambi No. 161 Kayuagung Telp. (0712) 321278 Fax. (0712) 323893

Kayuagung, 25 Februari 2008

nomor : 970/281/D.Penda/2008
jenis : Biasa
sifat : -
tujuan : Selesai Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang
di -
Palembang

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 1010/G-17/FE-UMP/V/2007
tanggal 12 Mei 2007 perihal mohon bantuan data kepada mahasiswa :

Nama : Wita Suryani

NIM : 222003017

Mata Kuliah : Akutansi Pemerintahan

Perlu disampaikan, bahwa kami dapat menyetujui/ mengizinkan pelaksanaan
penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut.

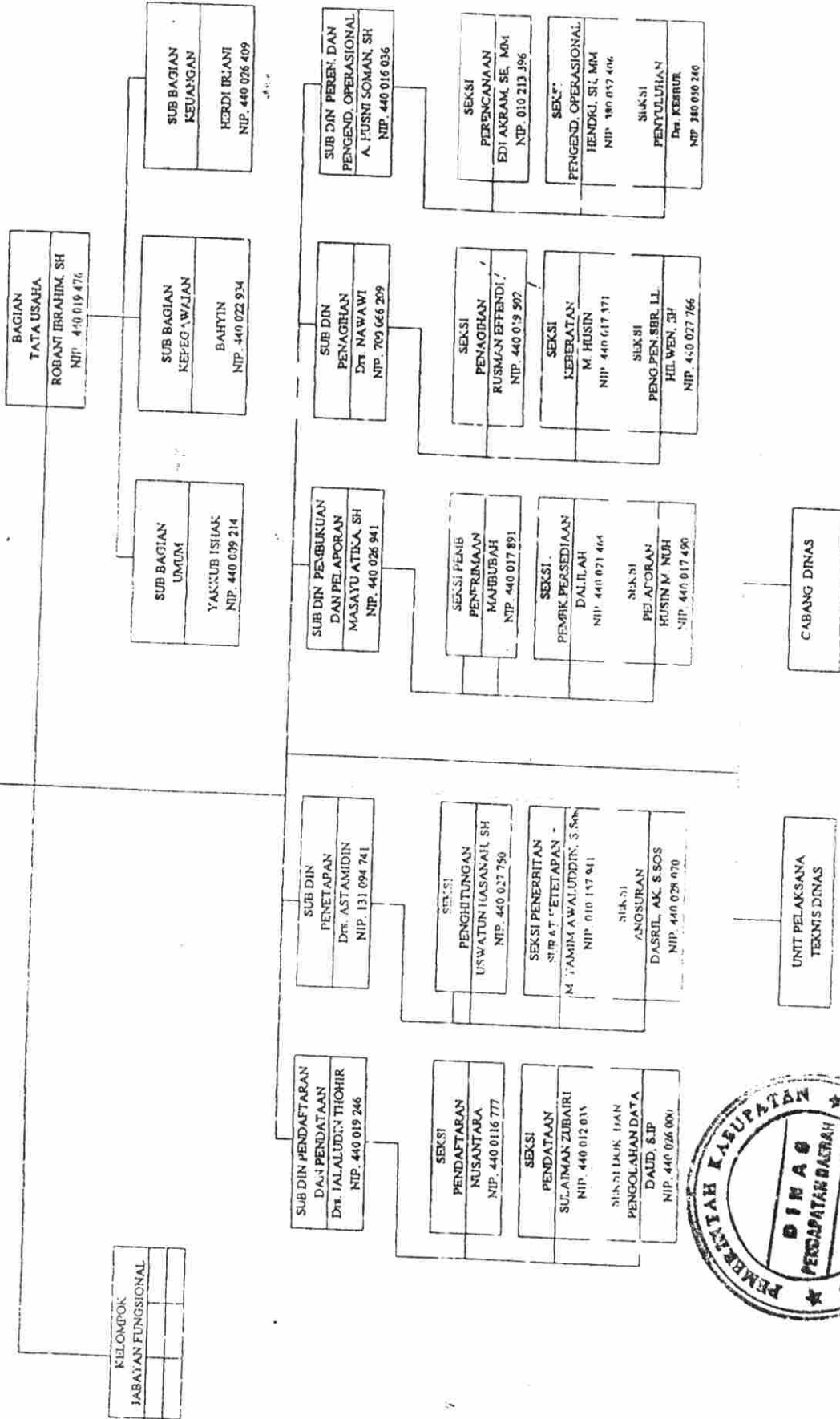
Demikian untuk dimaklumi dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

A.N. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KABAG TATA USAHA



[Handwritten Signature]
ROBANI IBRAHIM, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP 440 019 478

KAPALA DINAS
Drs. A. SANUSI SALEH, S.P., M.M.
NIP. 030 020 811





KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN USULAN PENELITIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

NAMA MAHASISWA : WITA SURYANI PEMBIMBING
 NIM : 22 2003 017 KETUA : Drs. Sunardi, SE. M.Si
 JURUSAN : AKUNTANSI ANGGOTA :

TITULUS USULAN PENELITIAN : ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI ANGKUTAN
 SUNGAI DANAU DAN PENYEBRANGAN DALAM
 RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
 DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 (OKI)

NO	TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	9-9-07	Pro Lsp	<i>[Signature]</i>		Pabrik
2	17-9-07	Pro Lsp	<i>[Signature]</i>		Ace
3	06-10-07	UP (RM)	<i>[Signature]</i>		Perbener
4	20-10-07	UP (Team)	<i>[Signature]</i>		
5	05-11-07	UP (M. andri)	<i>[Signature]</i>		Pabrik
6	10-11-07	UP	<i>[Signature]</i>		Perbener
7	21/11/07	UP	<i>[Signature]</i>		Ace Jenni

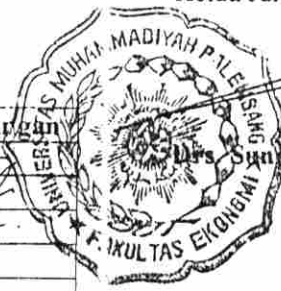
Tanggal Seminar yang disepakati :

Di keluaran : Palembang
 Pada Tgl

 a.n. Dekan
 Ketua Jurusan,

Daftar Mahasiswa Peserta Seminar
 Yang dibawa oleh Pemakalah:

NO	Nama Mahasiswa	NIM	Tanda Tangan
1	Emilia	22 2002 178	<i>[Signature]</i>
2	Lina Maryati	22 2002 276	<i>[Signature]</i>
3	INDANA ADILAH	22 2003 019	<i>[Signature]</i>
4	HELDA MINGSIH	22 2003 038	<i>[Signature]</i>
5	Nurchasanah	22 2003 006	<i>[Signature]</i>
6	Vera Ayu Fitri	22 2003 163	<i>[Signature]</i>
7	Martina	22 2003 220	<i>[Signature]</i>
8	Okta Melda Yani	22 2003 158	<i>[Signature]</i>


 Drs. Sunardi, SE. M.Si

CATATAN :
 • Usulan Penelitian di Seminkan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing
 • Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Pert aikan Usulan Penelitian.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	: Wita Suryani	PEMBIMBING	
N I M/NIRM	: 222003017	KETUA	: Drs. Suherdi, SE.MSi
PROGRAM STUDI	: MANAJEMEN/AKUNTANSI	ANGGOTA	
JUDUL SKRIPSI	Analisis Penerimaan Retrebusi Pasar Karcis Pungutan Umum Dalam Rangk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).		

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1		UP	<i>[Signature]</i>		
2	28-01-08	Bab I. II. III	<i>[Signature]</i>		Pabrik
3	04-02-08	Bab I. II. III	<i>[Signature]</i>		Pabrik
4	10-02-08	Bab I. II. III	<i>[Signature]</i>		Ace
5	10-02-08	Bab IV. V.	<i>[Signature]</i>		Pabrik
6	13-02-08	Bab W. V	<i>[Signature]</i>		Pabrik
7	14-02-08	Bab W. V	<i>[Signature]</i>		Pabrik
8		Bab W. V	<i>[Signature]</i>		Ace
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa dibenkan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Di keluarkan di Palembang
 Pada tanggal 19 10 08

[Signature]
 Drs. Suherdi, SE.MSi
 FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI



JURUSAN

- JURUSAN MANAJEMEN (S1)
- JURUSAN AKUNTANSI (S1)
- MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

IZIN PENYELENGGARAAN

- No 3450/D/T/2005
- No 3449/D/T/2005
- No 1611/D/T/2005

AKREDITASI

- No 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VII/2003
- No 020/BAN-PT/Ak-IXI/S1/IX/2005
- No 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpi-III/V/2004

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎(0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN
 PERBAIKAN SKRIPSI**

Hari / Tanggal
 Waktu
 Nama
 NIM
 Jurusan
 Mata Kuliah Pokok
 Judul Skripsi

- : Selasa, 4 Maret 2008
- : 13.00 WIB
- : **WITA SURYANI**
- : 22 2003 017
- : Akuntansi
- : Akuntansi Pemerintahan
- : **ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR KARCIS
 PUNGUTAN UMUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN
 PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN OGAN
 KOMERING ILIR**

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING
 SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. Sunardi, SE. M.Si	Pembimbing		
2.	Rosalina Ghazali, SE. Ak. M.Si	Ketua Penguji	26 / Maret 2008	8-3-2008
3.	Drs. Sunardi, SE. M.Si	Anggota Penguji I		
4.	M. Irfan Tarmizi, SE. Ak. MBA	Anggota Penguji II	6-3-2008	8-3-2008

Palembang, Maret 2008
 An. Dekan
 Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Sunardi, SE. M.Si

BIODATA PENULIS

Nama : WITA SURYANI
Tempat Tanggal Lahir : Meranjat, 23 Januari 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Meranjat 'I Dusun I No.74
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Telepon : 085268075451
Nama Orang Tua
1. Ayah : M. Said Idris (Alm)
2. Ibu : Ayunah, Amd
Pekerjaan Orang Tua
2. Ayah : -
3. Ibu : PNS
Alamat orang tua : Meranjat II Dusun I No. 74
Telephon : 081367066557